

Interaksi Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Siska Amelia¹

Abstrak

Pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan diperlukan upaya-upaya pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan permasalahan pada wilayah bersangkutan. Provinsi Sumatera Barat yang memiliki ragam potensi dan permasalahan sehingga tingkat pertumbuhan wilayah juga sangat beragam. Berdasarkan tahapan pembangunan menurut teori Rostow, Provinsi Sumatera Barat masuk dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang masih ada dalam tahapan prasyarat lepas landas. Dalam melihat tingkat pertumbuhan dan kekuatan hubungan antar wilayah dengan melihat interaksi wilayah dengan model gravitasi. Untuk melihat kekuatan hubungan antar wilayah berdasarkan jarak dan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan dengan unit analisis adalah kabupaten/kota. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kekuatan hubungan berdasarkan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan tidak selalu dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kegiatan ekonomi. Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah provinsi dan pusat agar tercipta pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Kata kunci: ekonomi wilayah; pengembangan wilayah; model gravitasi

Abstract

Development must be directed towards balanced equity, growth (efficiency) and sustainability in economic development. In an effort to realize equitable development, efforts to develop the region are needed that are adapted to the potential, conditions and problems of the area concerned. West Sumatra Province which has a variety of potentials and problems so that the regional growth rate is also very diverse. Based on the stages of development according to Rostow's theory, West Sumatra Province is in the take-off stage and there are even some areas that are still in the prerequisite stage for takeoff. In looking at the growth rate and the strength of the relationship between regions by looking at the interaction of the region with the gravity model. To see the strength of the relationship between regions based on distance and population size variables, per capita income and the number of urban utilities, the analysis unit is regency / cities. The results of the analysis show that the strength of the relationship based on the variables of population, per capita income and the number of urban utilities is not always influenced by the proximity of the area to the center of government or the center of economic activity. Dharmasraya Regency, Pasaman Regency, Pasaman Barat Regency need special attention by the provincial and central governments in order to create growth and equitable development

.Keywords: regional economy; area regional development; gravity model

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan perubahan mendasar struktur sosial, sikap masyarakat, institusi-institusi

nasional, menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Todaro 2000). Pembangunan harus

diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi (Rustiadi *et al.* 2018).

Tahapan pembangunan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rostow terdiri dari lima tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari 1) tahap masyarakat tadisional, 2) tahap prasyarat lepas landas, 3) tahap lepas landas, 4) tahap menuju kematangan dan 5) tahap konsumsi tinggi. Pada tahap masyarakat tradisional dimana tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat rendah sehingga hasil tidak disimpan atau diperdagangkan, sektor pertanian masih mendominasi kehidupan masyarakat, belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahap ini juga pengaruh hubungan kekeluargaan dan kesukuan masih sangat besar terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang serta kebijakan yang dibuat masih dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah.

Tahap prasyarat lepas landas kehidupan masyarakat tidak lagi didominasi oleh pertanian tetapi sudah mulai berkembang industri khususnya industri pertambangan. Pada tahap ini sudah mulai ada pengaruh dari luar wilayah sehingga teknologi dan ilmu pengetahuan mulai berkembang dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian. Dengan adanya perkembangan tersebut maka perlu adanya pendanaan dari luar. Pola kehidupan masyarakat juga berubah dimana hasil produksi tidak hanya sebatas konsumsi tetapi masyarakat mulai berfikir untuk menabung dan berinvestasi. Pada tahapan ini juga mulai bermunculan lembaga-lembaga dan organisasi tingkat nasional dan elit-elit baru. Perubahan yang terjadi tersebut di negara-negara Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Afrika dengan merombak masyarakat tradisional yang sudah ada. Sedangkan untuk negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru perubahan tersebut dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada.

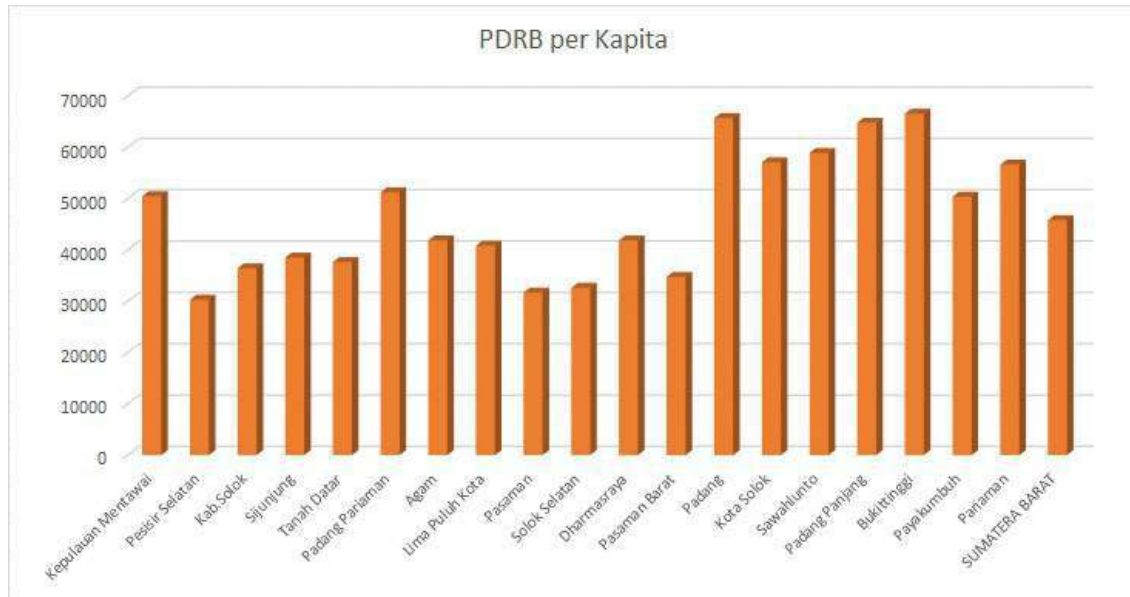
Tahap lepas landas dimana pada tahap ini industrialisasi semakin meningkat, terjadi perkembangan satu atau beberapa industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Tingkat tabungan dan investasi juga semakin meningkat, laju investasi dan tabungan meningkat 5-10 persen dari pendapatan nasional. Pada tahapan ini juga terjadi peningkatan pertumbuhan regional dan terjadi

penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi semakin berkembang serta semakin berkembang pula industri manufaktur.

Pada tahap menuju kematangan keadaan perekonomian terus menerus bertumbuh yang terkadang bersifat fluktuatif. Pada tahap ini teknologi modern semakin berkembang diberbagai sektor kegiatan-kegiatan perekonomian. Industri baru semakin berkembang dengan sangat pesat dan meninggalkan industri-industri lama, sehingga barang yang dulunya berasal dari luar wilayah sudah mampu di produksi dalam wilayah sendiri. Tingkat tabungan dan investasi semakin meningkat dengan persentase 10-20 persen dari pendapatan nasional.

Tahap konsumsi tinggi merupakan tahapan pembangunan tertinggi menurut teori Rostow. Pada tahap ini pendapatan perkapita masyarakat meningkat sampai pada titik dimana sebagian besar masyarakat mampu membeli barang-barang konsumsi tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Proporsi tenaga kerja pada tahap ini yang terbesar adalah di bidang jasa. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik pada tahap ini juga semakin besar dimana setiap wilayah berlomba-lomba memperbesar pengaruh dan kekuasaannya terhadap wilayah lainnya. Pada tahap ini juga tercipta *welfare state* dimana terciptanya kemakmuran yang lebih merata untuk masyarakat dengan menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif.

Berdasarkan tahapan pembangunan Rostow tersebut, Provinsi Sumatera Barat masih berada dalam tahapan lepas landas bahkan ada beberapa wilayah yang ada di Sumatera Barat masih dalam tahapan prasyarat lepas landas. Hal tersebut dapat kita lihat pada beberapa wilayah di Sumatera Barat masih menggunakan teknologi konvensional dalam peningkatan hasil produksi pertaniannya belum menggunakan teknologi moderen. Beberapa wilayah lainnya inovasi teknologi dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian sudah meningkat dan industri-industri manufaktur juga mulai berkembang. Beberapa wilayah memiliki pendapatan perkapita yang cukup tinggi, sedangkan wilayah lainnya masih memiliki pendapatan perkapita yang rendah. Tahapan ini merupakan masa transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan (Jhingan 2016).



Sumber: Provinsi dalam angka, 2020

Gambar 1. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data pendapatan per kapita masyarakat dapat kita lihat beberapa wilayah memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi. Kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pendapatan per kapita provinsi adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan perlu dilakukan pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi wilayah yang bersangkutan (Sumpeno 2011). Pengembangan kawasan atau wilayah merupakan gambaran tentang pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran pengembangan wilayah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, maka perlu untuk melihat interaksi wilayah. Interaksi wilayah digunakan untuk melihat kekuatan hubungan dan tingkat perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diperlukan dalam membuat prioritas kebijakan pembangunan, dimana kebijakan pembangunan difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki pendapatan per kapita yang masih di bawah pendapatan per kapita provinsi. Dalam melihat interaksi wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan model gravitasi. Konsep dasar model gravitasi adalah menitikberatkan pada ukuran dan

jarak satu wilayah dengan wilayah lainnya dengan menghitung kekuatan relatif dari hubungan antar wilayah (Muta'ali 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metoda kualitatif digunakan untuk melihat gambaran pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Metode kuantitatif dilakukan dengan mangkaji berbagai penelitian yang terkait dengan pengembangan wilayah. Informasi dan data yang dikumpulkan terkait dengan data kependudukan, jumlah utilitas perkotaan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data provinsi dan kabupaten/kota dalam angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, Dalam model gravitasi wilayah dianggap sebagai suatu massa sehingga hubungan antar wilayah disamakan dengan hubungan antar massa. Setiap massa wilayah mempunyai daya tarik sehingga akan terjadi saling mempengaruhi antar wilayah.

Dalam penelitian ini untuk melihat interaksi wilayah kabupaten/kota akan menghasilkan ragam model gravitasi berdasarkan jumlah penduduk, utilitas

perkotaan dan pendapatan per kapita kabupaten/kota dan jarak antar wilayah. Menurut Warpani (1980) dan Muta'ali (2015) massa dalam model gravitasi terdiri dari massa 1 dan massa 2, dimana massa 1 adalah tetap dan massa dua akan beragam. Pada penelitian ini yang menjadi massa 1 adalah Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat dan massa 2 adalah kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumatera Barat. Hasil perhitungan model gravitasi akan memperlihatkan kabupaten/kota mana yang mempunyai interaksi yang kuat dengan pusat pemerintahan berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah utilitas perkotaan dan pendapatan per kapita. Formula yang digunakan dalam model gravitasi adalah:

$$g = \frac{m_2}{r_{12}^2}$$

Keterangan:

- I12 = interaksi antar wilayah 1 dan 2
- m1 = massa wilayah 1
- m2 = massa wilayah 2
- r12 = jarak antar wilayah 1 dan 2
- b = konstanta jarak, tergantung dari nilai aksesibilitas wilayah dimana semakin baik aksesibilitas maka semakin kecil konstanta, sehingga potensi interaksinya semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Vooheers (Muta'ali 2015) membuat konstanta pangkat jarak berdasarkan tujuan perjalanan, yaitu bekerja = 0,5, sosial = 3, serta untuk berbelanja, bisnis, rekreasi dan lain-lain = 2

g = konstanta proporsional (misal nilainya 1)

Nilai I₁₂ menunjukkan interaksi antar wilayah atau eratnya hubungan antara wilayah pusat dengan wilayah lainnya, dimana semakin tinggi nilai I₁₂ maka semakin erat hubungan antara wilayah pusat dengan wilayah lainnya, sehingga semakin tinggi pula aktivitas ekonomi pada wilayah tersebut (Muta'ali 2015). Menurut Nyoman dan Utama (2011) wilayah yang mempunyai nilai I₁₂ tinggi memiliki ciri sebagai wilayah pusat, wilayah strategis dan tingkat keterhubungan wilayah yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah 42,2 ribu km²

atau setara dengan 2,21 persen dari luas Indonesia. Secara geografis Sumatera Barat berada pada 0^o 54' Lintang Utara dan 3^o 30' Lintang Selatan dan antara 98^o 36' – 101^o 53' Bujur Timur.

Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan Kota Padang sebagai ibukota provinsi. Kota Padang sebagai ibukota provinsi merupakan wilayah yang paling banyak diminati sebagai daerah hunian mencapai 17,33 persen dari total penduduk Sumatera Barat. Sedangkan berdasarkan kepadatan penduduk, Kota Bukittinggi yang memiliki kepadatan lebih tinggi di bandingkan Kota Padang. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan Kota Bukittinggi yang cukup pesat di sektor wisata yang menyebabkan tingginya penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Pendapatan per Kapita dan Utilitas Perkotaan Kabupaten/Kota

No	KABUPATEN	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita (juta)	Utilitas Perkotaan
1	KEP. MENTAWAI	92021	50.46	123
2	PESISIR SELATAN	463923	30.27	230
3	SOLOK	373414	36.39	80
4	SIJUNJUNG	237376	38.48	143
5	TANAH DATAR	348219	37.6	66
6	PADANG PARIAMAN	415613	51.22	78
7	AGAM	491282	41.83	143
8	LIMA PULUH KOTA	382817	40.79	88
9	PASAMAN	281211	31.68	66
10	SOLOK SELATAN	171075	32.59	86
11	DHARMASRAYA	247579	41.81	76
12	PASAMAN BARAT	443722	34.71	122
KOTA				

No	KABUPATEN	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita (juta)	Utilitas Perkotaan
13	PADANG	950871	65.68	517
14	SOLOK	71010	57.04	58
15	SAWAHLUNTO	62524	58.88	101
16	BUKITTINGGI	130773	66.52	141
17	PADANG PANJANG	53693	64.75	131
18	PAYAKUMBUH	135573	50.37	111
19	PARIAMAN	88501	56.59	102

Sumber: Provinsi dan Kabupaten Dalam Angka, 2020

Berdasarkan jumlah penduduk wilayah yang mempunyai jumlah penduduk terbesar adalah Kota Padang sebesar 950.871 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kota Padang Panjang sebesar 53.693 jiwa. Pendapatan per kapita tertinggi adalah Kota Bukittinggi sebesar 66,52 juta yang diikuti Kota Padang sebesar 65,68 juta dan Kota Padang Panjang sebesar 64,75 juta. Wilayah yang mempunyai pendapatan per kapita paling rendah adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 30,27 juta. Sedangkan utilitas perkotaan yang terdiri dari jumlah rumah sakit, jumlah hotel, jumlah restoran dan jumlah perguruan tinggi, wilayah yang memiliki utilitas perkotaan terbanyak adalah Kota Padang sebanyak 517 unit. Wilayah yang memiliki utilitas perkotaan yang sedikit adalah Kota Solok sebanyak 58 unit.

Dalam model gravitasi penentuan massa untuk melihat interaksi wilayah sangat bergantung pada

tujuan yang ingin di capai dalam suatu penelitian (Muta'ali 2015). Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan variabel yang umum digunakan sebagai massa adalah jumlah penduduk, pendapatan wilayah, pendapatan per kapita, kesempatan kerja, besaran investasi, potensi wilayah dan berbagai variabel ekonomi lainnya. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan sebagai massa adalah jumlah penduduk, pendapatan perkapita dan jumlah utilitas perkotaan yang terdiri dari jumlah rumah sakit, jumlah hotel, jumlah restoran, jumlah perguruan tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model gravitasi diperoleh interaksi wilayah setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan (tabel 2)

Tabel 2. Hasil Perhitungan Interaksi Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Jarak	J ²	Interaksi Jumlah Penduduk	Interaksi Pendapatan per Kapita	Inetraksi Utilitas Perkotaan
1	KEP. MENTAWAI	174	30276	2.89	0.11	2.10
2	PESISIR SELATAN	77	5929	74.40	0.34	20.06
3	SOLOK	87	7569	46.91	0.32	5.46
4	SIJUNJUNG	127	16129	13.99	0.16	4.58
5	TANAH DATAR	102	10404	31.83	0.24	3.28
6	PADANG PARIAMAN	35	1225	322.61	2.75	32.92
7	AGAM	114	12996	35.95	0.21	5.69
8	LIMA PULUH KOTA	172	29584	12.30	0.09	1.54
9	PASAMAN	169	28561	9.36	0.07	1.19
10	SOLOK SELATAN	106	11236	14.48	0.19	3.96
11	DHARMASRAYA	210	44100	5.34	0.06	0.89
12	PASAMAN BARAT	172	29584	14.26	0.08	2.13
13	PADANG	0	0	0.00	0.00	0.00
14	SOLOK	65	4225	15.98	0.89	7.10
15	SAWAHLUNTO	148	21904	2.71	0.18	2.38

No	Kabupaten/Kota	Jarak	J ²	Interaksi Jumlah Penduduk	Interaksi Pendapatan per Kapita	Inetraksi Utilitas Perkotaan
16	BUKITTINGGI	91	8281	15.02	0.53	8.80
17	PADANG PANJANG	72	5184	9.85	0.82	13.06
18	PAYAKUMBUH	124	15376	8.38	0.22	3.73
19	PARIAMAN	56	3136	26.83	1.19	16.82

Sumber: Hasil pengolahan data, 2021

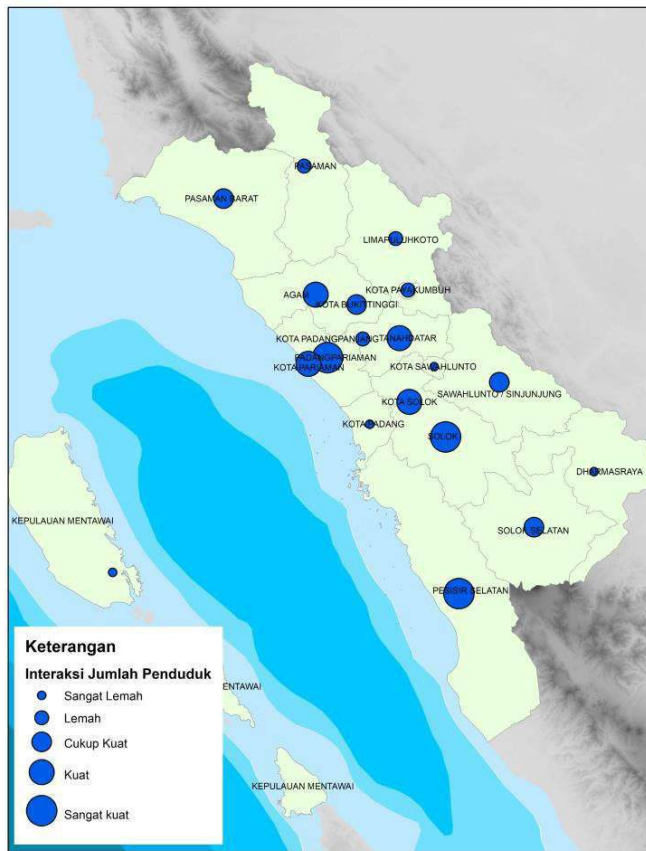
Hasil perhitungan model gravitasi (tabel 2) memperlihatkan hasil interaksi wilayah yang beragam. Kekuatan thubungan anatar wilayah berdasarkan hasil penelitian terdahulu

kelas dengan formula jumlah data dibagi jumlah kelas. Dari hasil pengelompokkan berdasarkan kelasnya diperoleh kekuatan hubungan setiap wilayah terhadap wilayah pusat (Kota Padang) untuk masing-masing variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan.

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah dengan massa jumlah penduduk menghasilkan beragam kekuatan hubungan antar wilayah pusat dengan wilayah lainnya. Beberapa wilayah kabupaten/ kota yang mempunyai jarak yang dekat dengan pusat pemerintahan mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat dan kuat, dan ada juga beberapa wilayah yang terletak relatif jauh dari pusat memiliki kekuatan hubungan yang kuat.

Menurut Martines dan Masron (2020) pilihan masyarakat untuk tempat tinggal tidak hanya berdasarkan kedekatan dengan pusat pemerintahan saja tetapi juga kelengkapan infrastruktur di suatu wilayah. Hal lain yang menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih tempat tinggal adalah potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah yang menjanjikan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil inetraksi wilayah berdasarkan variabel jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto mempunyai hubungan yang sangat

lemah. Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh mempunyai kekuatan hubungan yang lemah dengan pusat pemerintahan (Kota Padang). Sedangkan kabupaten/ kota yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten



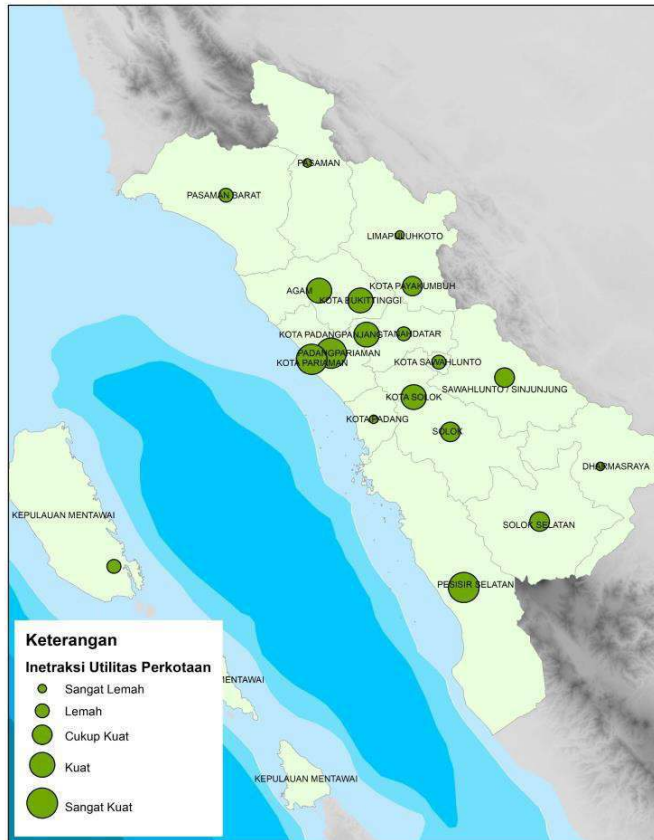
Gambar 2. Inetraksi Wilayah Variabel Jumlah Penduduk

dikelompokkan menjadi empat sampai dengan tujuh kelas. Dalam penelitian ini kekuatan hubungan dikelompokkan dalam lima kelas, yaitu 1) sangat kuat, 2) kuat, 3) cukup kuat, 4) lemah. 5) sangat lemah. Pembagian kelas kekuatan hubungan dalam penelitian ini menggunakan metode *quantile*, dengan pembagian setiap anggota dalam kelas sama rata (Kurniati dan Raharjo 2015). Penentuan interval

Padang Pariaman. Kabupaten/ kota yang memiliki kekuatan hubungan yang kuat dengan pusat pemerintahan adalah Kabupaten Agam, Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martines dan Masron, hasil analisis memperlihatkan kekuatan hubungan variabel jumlah utilitas perkotaan Kabupaten Pasaman mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah terhadap pusat pemerintahan (Kota Padang). Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah utilitas perkotaan yang ada di Kabupaten Pasaman lebih sedikit dibandingkan kabupaten/ kota lainnya. Kelengkapan infrastruktur suatu wilayah menjadi alasan masyarakat untuk memilih tempat tinggal.

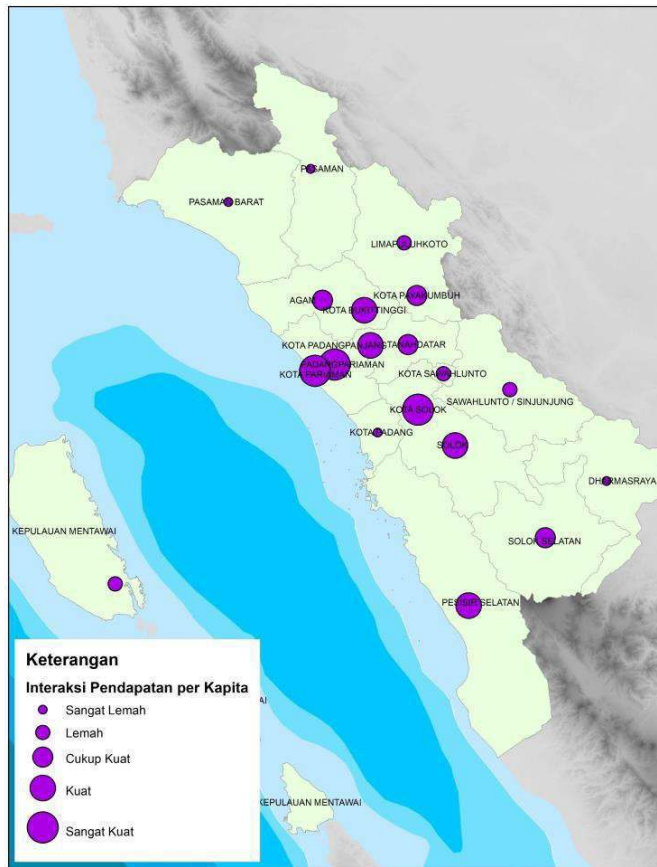
Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat berdasarkan variabel utilitas perkotaan adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan dalam kelas kuat adalah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Pasaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan lemah adalah Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar.



Gambar 3. Inetraksi Wilayah Variabel Jumlah Utilitas Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah dengan variabel jumlah utilitas perkotaan dapat di lihat ada keterkaitan jumlah utilitas perkotaan dengan jumlah penduduk sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Martines dan Masron (2020). Salah satu alasan masyarakat untuk memilih tempat tinggal adalah kelengkapan infrastruktur di suatu wilayah. Hal ini dapat kita lihat Kabupaten Dharmasraya yang memiliki jumlah utilitas perkotaan yang lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan kabupaten/ kota lainnya.

Hal tersebut juga terjadi untuk wilayah Kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman mempunyai kekuatan hubungan yang lemah dengan pusat pemerintahan (Kota Padang). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk di Kabupaten Pariaman yang lebih kecil



Gambar 4. Inetraksi Wilayah Variabel Pendapatan per Kapita

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah variabel pendapatan per kapita dapat dilihat wilayah-wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat kuat dengan pusat pemerintahan (Kota Padang) adalah Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Pariaman. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang masuk dalam kelas kuat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang cukup kuat adalah Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan dan Kota payakumbuh

Sedangkan wilayah-wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang lemah terhadap pusat pemerintahan (Kota Padang) adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Sawahlunto. Wilayah yang mempunyai kekuatan hubungan yang sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Hal tersebut menunjukkan pendapatan per kapita

pada wilayah tersebut mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Secara besaran nilai pendapatan per kapita yang terkecil adalah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 30,27 juta, tetapi dengan jarak yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan (Kota Padang) menyebabkan kekuatan hubungan Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kelas kuat. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergerakan aktifitas ekonomi dari Kota Padang ke Kabupaten Pesisir Selatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini untuk melihat kekuatan hubungan antar kabupaten/ kota dengan pusat pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita dan jumlah utilitas perkotaan yang terdiri dari jumlah rumah sakit, jumlah restoran, jumlah hotel dan jumlah perguruan tinggi. Hasil analisis dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dalam pengembangan wilayah.

Kekuatan hubungan wilayah serta pembangunan di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh kedekatan wilayah tersebut dengan pusat pemerintahan atau pusat kota tetapi dipengaruhi juga oleh hal lain. Faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah adalah adanya jumlah utilitas perkotaan atau infrastruktur di suatu wilayah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Martines dan Masron (2020), Amelia (2019), Kuncoro dan Rahajeng (2005). Hal lain yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk tinggal di suatu wilayah adalah tingkat keamanan wilayah bersangkutan (Hanim dan Ragimun 2015, Kuncoro dan Rahajeng 2005, Limanlı 2015), teknologi (Melliger dan Lilliestam 2021).

Hasil analisis inetraksi wilayah variabel jumlah penduduk memperlihatkan kekuatan hubungan yang lemah dan sangat lemah adalah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Hasil analisis interaksi wilayah variabel utilitas perkotaan memperlihatkan kekuatan hubungan yang lemah dan sangat lemah adalah Kabupaten Dharmasraya,

Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Sawahlunto. Kabupaten/ kota tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun pusat karena pada wilayah tersebut keberadaan utilitas perkotaan yang masih sangat minim, hal tersebut menyebabkan wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis interaksi wilayah variabel pendapatan per kapita memperlihatkan kekuatan hubungan lemah dan sangat lemah dengan pusat pemerintahan adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Sawahlunto. Pada wilayah-wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian pada wilayah tersebut agar terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S. 2019. The Stimulant Assistance Program Of Self-Help Housing In Attempts To Improve The Living Quality Of Middle-Class In Indonesia The Stimulant Assistance Program Of Self-Help Housing In Attempts To Improve The Living Quality Of Middle-Class In Indonesia. 24(August), 55–64. doi.org/10.9790/0837-2408035564
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Dalam Angka. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Dalam Angka. Jakarta
- Friedman, John dan Alloson. 2008. Regional Economic Development and Planning. Mars. MIT Press
- Hanim, A., & Ragimun, R. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Di Daerah: Study Kasus Di Kabupaten Jember Jawa Timur. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 14(3), 3–20. doi.org/10.31685/kek.v14i3.55)
- Kuncoro. M., Rahajeng. A. 2005. Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY. Jurnal Ekonomi Pembangunan volume 10 no. 2 hal 171-184
- Kurniati, E., & Rahardjo, N. 2015. Evaluasi Metode Klasifikasi dalam Pembuatan Peta Kepadatan Penduduk DIY dengan Permukaan Statistik dan Uji Proporsi. Bumi Indonesia
- Limanlı, Ö. (2015). Determinants of R&D Investment Decision in Turkey. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 759–767. doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.471
- Martinez, R., & Masron, I. N. 2020. Jakarta: A city of cities. *Cities*, 106 (July). doi.org/10.1016/j.cities.2020.102868
- Melliger, M., & Lilliestam, J. 2021. Effects of coordinating support policy changes on renewable power investor choices in Europe. *Energy Policy*, 148(PB), 111993. doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111993
- Muta'ali, L. 2015. Teknik Analisis Regional; Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Nyoman, N., Andriyani, S., & Utama, M. S. 2011. Analisis pusat pertumbuhan di kabupaten karangasem. *Jurnal EP Unud*, 4(4), 220–229
- Rustiadi, R., Saefulhakim, S., Panuju, D.R. 2018. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Supeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu, Edisi Kedua, Penerbit Read. Aceh
- Warpani. S. 1980. Analisis Kota dan Daerah. Penerbit ITB. Bandung